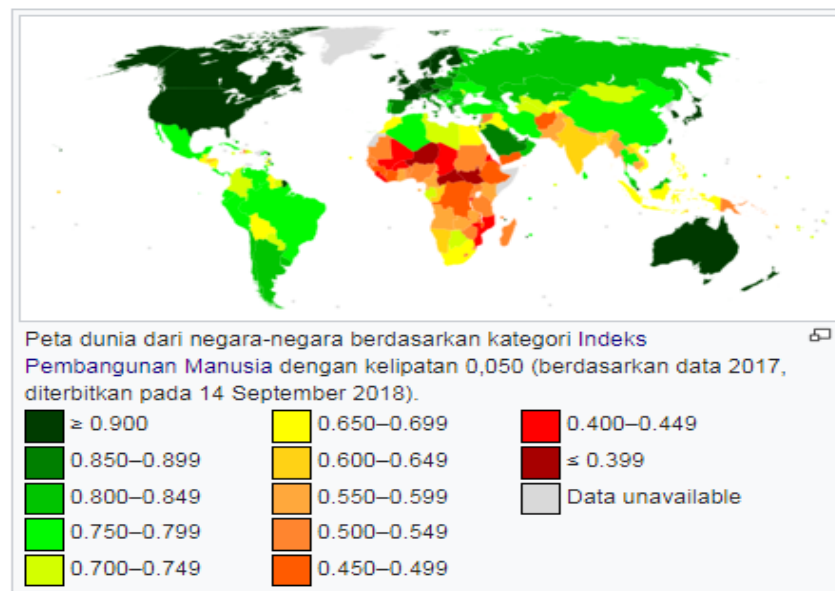


BAB I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai dasar penilaian untuk mengklasifikasikan suatu negara dapat dikatakan maju, berkembang maupun terbelakang. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan manusia adalah indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Berikut peta dunia dari negara-negara berdasarkan kategori Indeks Pembangunan Manusia dengan kelipatan 0,050 (berdasarkan data 2017, diterbitkan pada 14 September 2018):



Gambar 1.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Keterangan:

	: sangat tinggi
	: tinggi
	: menengah
	: rendah

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Harahap (2011) dalam Budi (2017) mengungkapkan bahwa Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan pada daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik Indonesia mulai menghitung indeks pembangunan manusia pada tahun 1996, saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun sekali. Tahun 2004 periode menghitung IPM di Indonesia diubah menjadi setiap tahun, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM dari BPS tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan IPM dari UNDP, pada perhitungan IPM yang dilakukan BPS digunakan untuk

membandingkan capaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia, sedangkan perhitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia secara global, sedangkan perhitungan yang dilakukan BPS digunakan sebagai *benchmark* posisi IPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia diharapkan dapat menunjang keberhasilan pembangunan pada berbagai aspek.

Belanja Pemerintah Daerah yang terfokus untuk pengeluaran indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom dengan tujuan pembiayaan pengeluaran serta kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus urusan daerahnya masing-masing. Urusan daerah yang dimaksudkan harus sesuai dengan prioritas nasional, guna mempercepat pencapaian standar pembangunan dan pemerataan daerah. Pengalokasian anggaran PAD, DAU dan DAK yang tepat sasaran oleh pemerintah daerah Jawa Tengah juga dapat menentukan pertumbuhan nilai IPM. Selain dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), faktor lain yang dianggap penting dalam meningkatkan angka

pertumbuhan IPM di Jawa Tengah adalah karena adanya pengeluaran belanja pemerintah di bidang pendidikan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan. Bidang pendidikan merupakan faktor terpenting dalam perkembangan pembangunan manusia disuatu negara. Pendidikan merupakan salah satu penunjang kapabilitas manusia dalam mengatasi masalah kemiskinan, lonjakan pengangguran, pemerataan ekonomi (Todaro dan Smith, 2004:404). Untuk mendukung aspek pendidikan dibutuhkan suatu anggaran. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan melalui pengeluaran pemerintah.). Belanja fungsi pendidikan merupakan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat belanja barang publik (Imron, 2018). Belanja fungsi pendidikan berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya sebesar 20%. Hal tersebut sesuai dengan Usaha Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan IPM dalam bidang pendidikan tertuang dalam kebijakan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, bahwa harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari dana APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka

harapan lama sekolah dihitung mulai dari usia 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun keatas. Indikator angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang relatif cepat, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah cenderung lambat. Perbedaan tersebut dinilai wajar dikarenakan angka harapan lama sekolah dihitung saat usia 7 tahun keatas yang mulai mendapatkan pendidikan dasar. Indikator angka harapan lama sekolah digunakan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah digunakan sebagai penggambaran output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lambat. Kedua indikator tersebut menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia disetiap wilayah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2019) yang berjudul Analisis Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap IPM di Kabupaten/Kota EKS Karesidenan KEDU tahun 2012-2016. Penelitian tersebut akan digunakan untuk melihat hasil analisis pengaruh DAU dan DAK terhadap IPM pada rentang tahun tersebut. Penelitian oleh Anisa Fahmi, dkk (2018), dengan judul pengaruh good governance, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan PDRB per kapita terhadap IPM. Penelitian tersebut digunakan untuk pedoman dalam menjelaskan serta melihat hasil analisi dari pengaruh belanja fungsi pendidikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia

kabupaten/kota Jawa Tengah, digunakan untuk membantu menjelaskan alasan-alasan dalam perumusan hipotesis penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan beberapa variabel penelitian, yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2017-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?
4. Apakah belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Mengetahui pengaruh belanja fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan serta pemahaman mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - b. Berguna untuk peneliti selanjutnya, sebagai referensi maupun pedoman dalam menulis penelitiannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Berguna untuk mengambil kebijakan strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di setiap daerah.

b. Bagi Peneliti

Berguna untuk semakin mendalami wawasan mengenai permasalahan daerah terutama di Jawa Tengah yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis, mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan Landasan Teori, Kerangka Berfikir, dan Perumusan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pengolahan data, hasil analisis, interpretasi dari hasil analisis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian, keterbatasan, dan saran-saran serta pengembangan penelitian.